

RAPAT - Anggota DPRD Karangasem saat menghadiri rapat paripurna di gedung dewan, Kamis kemarin.

Cakupan Pelayanan Rendah PDAM Belum Mampu Setor PAD

Amlapura (Bali Post) -

Harapan Pemkab Karangasem agar PDAM bisa berkontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) tampaknya masih sulit terealisasi. Sebab, cakupan pelayanan PDAM Karangasem masih jauh dari ideal. Cakupan pelayanan administrasi baru 38,20 persen, sedangkan cakupan pelayanan teknis baru 46,87 persen.

Demikian terungkap dalam pendapat akhir Fraksi Gerindra DPRD Karangasem, dalam rapat paripurna, Kamis (6/8) kemarin. Laporan gabungan komisi yang dibacakan I Nyoman Mardana W., S.T., terhadap laporan Fraksi Gerindra, menyatakan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 690/477/SJ tertanggal 18 Februari 2009, PDAM yang cakupan pelayanannya belum mencapai 80 persen, masih dibebaskan dari kewajibannya melakukan setoran laba bersih pada PAD.

Dalam hasil audit kinerja PDAM tahun 2014, realisasi cakupan pelayanan administrasi dan teknis, masih jauh dari SE tersebut. Oleh karena itu, dengan penyertaan modal kepada PDAM sebesar Rp 2,4 miliar tahun ini yang sudah disetujui DPRD Karangasem, agar mampu dimaksimalkan PDAM Karangasem. Pen-

gelola PDAM diminta mampu membuat rancangan target dan penambahan penyertaan modal tersebut, agar di tahun 2020 dapat mencapai pelayanan 80 persen. Sehingga, pada tahun berikutnya dapat melakukan penyeteroran laba bersih pada PAD.

"PDAM Karangasem harus mampu meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat," katanya. Se-

dangkan, Fraksi NasDem dalam catatannya, menyatakan perlu adanya kajian mengenai perimbangan laba yang telah disetorkan kas daerah dengan besaran modal yang harus disertakan. Sehingga, memberikan kontribusi kesejahteraan ke sektor-sektor lain pada masyarakat Karangasem. Sedangkan, Fraksi Demokrat meminta Dirut PDAM Karangasem mampu meningkatkan cakupan pelayanan. Penyertaan modal ini sebagai upaya untuk meningkatkan investasi Pemkab Karangasem.

Penambahan modal diperlukan PDAM Karangasem untuk memperkuat struktur permodalan, agar PDAM mampu meningkatkan cakupan pelayanan untuk tercapainya MDG's 80 persen. Dirut PDAM Karangasem Gede T. Baktiyasa, sebelumnya mengakui pelayanan air bersih masih di bawah 80 persen.

PDAM masih kesulitan menjangkau masyarakat di sejumlah kecamatan, khususnya di wilayah pegunungan dan perbukitan seperti Kecamatan Kubu, Rendang bagian atas, dan Sidemen.

Tahun ini, pelayanan PDAM baru menjangkau sekitar 29 ribu rumah tersebar di seluruh kecamatan. Sehingga, untuk menambah jumlah pelayanan, sambungan rumah diupayakan akan terus ditambah setiap tahun. Tahun ini, PDAM Karangasem menerima penyertaan modal dari pemerintah daerah sebesar Rp 2,4 miliar. Anggaran itu, kata Baktiyasa bakal digunakan untuk program MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Penyertaan modal itu akan digunakan untuk pembangunan 1.000 SR (Sambungan Rumah) di Kecamatan Abang dan Karangasem. (kmb31)



Digelontor Rp 254 Juta hingga Rp 1 Miliar Lebih Per Desa

Pengelolaan Dana Desa Rawan Penyimpangan

Gianyar (Bali Post) -

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, aliran dana yang bakal dikelola pihak desa akan semakin besar. Sekjen Kementerian Keuangan RI Dr. Hadiyanto mengatakan, total dana desa yang dianggarkan pada tahun 2015 sebesar Rp 20,766 triliun. Dengan jumlah tersebut, masing-masing desa sedikitnya akan menerima dana desa sebesar Rp 254 juta. Jumlah tersebut akan naik sebesar 11 persen pada tahun 2016. "Sehingga dana yang akan diterima desa nantinya rata-rata Rp 1,4 miliar per desa. Namun, dana tersebut akan digelontor ke desa secara bertahap," katanya saat sosialisasi Kebijakan Dana Desa yang berlangsung di Balai Budaya Gianyar, Kamis (6/8) kemarin.

Realisasi penyaluran dana desa tahap I sampai sekarang telah mencapai Rp 8,173 triliun kepada 433 kabupaten/kota penerima dana desa. Jumlah ini setara dengan 98,408 persen dari alokasi dana desa yang seharusnya disalurkan pada tahap I yakni Rp 8,306 triliun.

Menurutnya, dana untuk desa tersebut terbilang cukup besar sehingga diperlukan kehati-hatian dalam pengelolaan. Terlebih lagi sesuai PP No. 22 Tahun 2015, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan in-



DANA DESA - Sosialisasi Kebijakan Dana Desa yang digelar di Balai Budaya Gianyar, Kamis (6/8) kemarin.

frastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan kunci desa dalam mengakses dana tersebut. Setiap desa diharapkan sudah menerapkan APBDes dan menyiapkan SDM yang memadai dalam mengelola dana.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi XI DPR-RI I Gusti Agung Rai Wirajaya. Menurutnya, kemampuan desa dalam mengelola anggaran terlebih lagi dalam jumlah besar, masih terbatas. Kalau dana desa diberikan secara gelondongan, dikhawatirkan banyak terjadi penyimpangan.

Apalagi mengingat kemampuan SDM pemerintahan desa yang belum merata. Maka dari itu, pemerintahan desa perlu diarahkan terlebih dulu mengenai tata kelola pemerintahan yang baik.

Persoalan lainnya juga menyangkut ketatnya aturan dan pengawasan dana desa. Pihaknya khawatir, banyak pimpinan pemerintahan desa merasa takut bermasalah dengan hukum sehingga enggan berinovasi. Maka dari itu, pembinaan kepada aparat pemerintahan desa secara intensif dan berkelanjutan sangatlah diperlukan. "Kami tidak mau terjadi banyak kepala desa yang tersandung masalah gara-gara mengelola dana desa," katanya. (kmb25)

Edisi : Jumat, 7 Agustus 2015

Hal : 9



Disdik Evaluasi Proyek Kolam Renang di Pidada

Singaraja (Bali Post) -

Sesuai kontrak, proyek kolam renang bertaraf internasional di Jalan Pidada, Kelurahan Banyuasri, Singaraja diserahkan 10 Agustus 2015 ini. Mendekati serah terima pekerjaan itu, pihak Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan evaluasi proyek tersebut, Jumat (7/8) ini.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan (Disdik) Buleleng I Made Astika ketika dimintai konfirmasi Kamis (6/8) kemarin mengatakan, pelaksana proyek telah menuntaskan pekerjaan kolam renang untuk venue Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali XII tahun 2015 dengan persentase penyelesaian hingga seratus persen. Sesuai kontrak, pelaksana proyek akan menyerahkan pekerjaannya itu Senin (10/8) pekan depan. Sebelum serah terima

pekerjaan itu, pihaknya bersama tim akan melakukan evaluasi kembali terhadap seluruh item pekerjaan di proyek bernilai miliaran rupiah tersebut. "Kami akan turun bersama tim untuk mengevaluasi, sebelum nantinya proyek itu kita terima dari rekanan," tegasnya.

Menurut Astika, evaluasi dilakukan untuk memastikan persentase pekerjaan dan kualitas masing-masing item pekerjaan. Dengan evaluasi tahap akhir ini akan diketahui apakah pekerjaan itu sudah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak kerja.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Buleleng I Nyoman Genep mengatakan, untuk melengkapi areal kolam renang, DKP telah menyiapkan sejumlah bibit tanaman hias. Bibit tanaman hias ini rencananya akan ditanam di sekitar areal kolam. (kmb38)

Edisi : Jumat, 7 Agustus 2015

Hal : 7



Dewan Soroti Bantuan Desa Pakraman Belum Cair

Kadisbud: Cair 9 Agustus

Denpasar (Bali Post) -

DPRD Bali kembali menyoroti belum cairnya dana bantuan untuk desa pakraman, subak, dan subak abian. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, dalam Rapat Kerja Dewan bersama eksekutif membahas RAPBD Perubahan 2015, Kamis (6/8) kemarin. Fraksi pimpinannya tidak melihat alasan substansial maupun aturan yang menghalangi proses pencairan dana tersebut.

"Kalau 2014, bahkan bisa cair bulan April. Sebelumnya juga seperti itu, tetapi kenapa tahun 2015 ini sampai sekarang dana itu belum cair. Bolak-balik bendesa kita, bolak-balik klian, pekaseh subak kita tetapi ini tidak selesai," ujarnya.

Sementara itu, lanjut Parta, informasi yang didapatnya dari Kepala BPMPD Bali dan Karo Keuangan justru mengatakan dana itu pada prinsipnya sudah bisa dicairkan. Alhasil, dirinya mempertanyakan di mana letak

persoalan sebenarnya. Mengingat, keterlambatan pencairan akan sangat mengganggu proses pertanggungjawaban yang dilaksanakan di lapangan. "Khususnya menyangkut tentang biaya pasraman budi pekerti. Kalau dana pasraman misalnya sampai bulan September baru cair, tentu dana itu tidak akan bisa dimanfaatkan dengan baik," jelasnya.

Sebelumnya, dalam Pandangan Umum Fraksi PDI-P, kata Parta, juga telah mengingatkan Gubernur Bali untuk mencermati

kinerja Kepala Dinas Kebudayaan Bali dan stafnya yang dinilai lemah dan tidak cekatan.

Kepala Dinas Kebudayaan Bali, Dewa Putu Beratha, beralasan, dana bantuan tak bisa segera cair lantaran terbit Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada 31 Desember 2014. Pihaknya harus mengurus surat ke Mendagri untuk meminta fatwa agar Bali diberikan kekhususan dengan tetap melaksanakan Permendagri No.37

Tahun 2011.

"Surat fatwa baru kita terima di Bali di atas tanggal 20 Mei. Tetapi untuk mencairkan dana ini tidak cukup hanya dengan surat fatwa. Perlu koordinasi dengan beberapa SKPD, perlu ada SK yang diselesaikan oleh Biro Hukum, juga perlu ada koordinasi dengan desa adat, bendesa, perbekel," ujarnya.

Beratha menambahkan, sosialisasi syarat pencairan dana bantuan dengan bendesa dan perbekel di seluruh Bali baru selesai dilakukan 22 Juni lalu. Di bulan Juli, pihaknya kembali terganjal dengan libur hari raya. Itu sebabnya, dana bantuan baru bisa dicairkan di bulan Agustus, tepatnya tanggal 9 nanti.

"Tadi dikatakan perbekel, bendesa bolak-balik sebenarnya dalam

kaitan untuk memperbaiki administrasi pencairan yang masih salah," jelasnya. Beratha menegaskan, dana bantuan baru bisa dicairkan bila desa pakraman, subak, dan subak abian telah mengajukan proposal dan memenuhi kelengkapan administrasi lainnya.

Hanya, saat ini, jumlah proposal yang masuk ternyata masih jauh dari harapan. Penerima BKK tercatat 606 desa/perbekel, 1.386 desa pakraman, 1.438 subak, dan 1.092 subak abian. Sedangkan proposal yang masuk hanya 47 dari desa/perbekel, 106 dari desa pakraman, 100 dari subak, dan 83 dari subak abian. Tahun ini, masing-masing desa pakraman mendapat bantuan Rp 200 juta, sementara masing-masing subak dan subak abian mendapat Rp 50 juta. (kmb32)

Edisi : Jumat, 7 Agustus 2015

Hal : 7



Kelola Dana Cukup Besar

Kemampuan SDM Aparatur Desa Perlu Ditingkatkan

Denpasar (Bali Post) -

Perhatian pemerintah terhadap desa semakin besar. Bahkan, desa mulai mendapat anggaran yang cukup besar melalui pos alokasi dana desa. Karena itu, peningkatan kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan yang ada, perlu menjadi perhatian semua pihak. Dikhawatirkan, bila salah mengelola, akan menjadi bumerang bagi aparat desa bersangkutan. Hal ini ditegaskan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Denpasar I Ketut Budiarta, Kamis (6/8) kemarin.

Tahun ini, Denpasar mengalokasikan dana yang cukup besar untuk desa sebagaimana dalam APBD Perubahan. Tingginya bantuan keuangan desa yang dialokasikan Pemkot Denpasar melalui APBD Perubahan 2015, mendapat perhatian serius Fraksi Gerindra DPRD Kota Denpasar. Terutama, terkait tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban dana yang cukup besar tersebut. "Salah satunya, masalah kemampuan sumber daya manusia (SDM) aparatur desa perlu mendapat perhatian Pemkot Denpasar. Caranya, dengan mengadakan pelatihan-pelatihan serta memberikan petunjuk yang jelas tentang pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga di kemudian hari para aparat desa tidak terjerat dalam kasus hukum," kata Budiarta.

Dikatakannya, bantuan keuangan desa memang untuk memenuhi amanat UU No. 6 Tahun 2014. Namun karena nilainya cukup tinggi, sehingga pengelolaannya perlu mendapat perhatian. Terlebih, selama ini pihaknya juga banyak menerima keluhan dari aparat desa tentang tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban dana tersebut.

Terkait dengan penurunan pendapatan di sektor pajak daerah dari Rp 523,9 miliar lebih menjadi Rp 520,4 miliar atau turun sekitar Rp 3,5 miliar, Gerindra minta agar Pemkot Denpasar mencari terobosan cerdas dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah. Terlebih, kini adanya perda tentang BPHTB dan penataan reklame, sehingga jelas akan mempengaruhi pendapatan daerah.

Di samping hal itu, Gerindra juga menyoroti masih maraknya pelanggaran jalur hijau di Kota Denpasar. Menyikapi hal ini, pihaknya minta ketegasan SKPD terkait dalam menindak pelanggaran sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada. "Sedangkan untuk langkah antisipasi, kami harapkan para pengawas lapangan harus benar-benar diberdayakan," katanya. (kmb12)

Edisi : Jumat, 7 Agustus 2015

Hal : 2



Pansus Pertanyakan Revisi Perda Retribusi Tower

Mangupura (Bali Post) –

Revisi Perda 5 Tahun 2013 oleh eksekutif, menjadi pertanyaan di kalangan Pansus Retribusi Tower DPRD Badung. Sebab, revisi aturan tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Badung ini, dinilai janggal. Sekertaris Pansus Retribusi Tower, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra mengatakan, yang menjadi pertanyaan pansus adalah revisi yang hanya dilakukan pada satu suku kata saja, yakni kata “atas”.

Kata ini, menurutnya, ditambah pada Pasal 8 ayat 2 di revisi Ranperda tersebut. “Hal ini perlu kami tanyakan kepada pihak eksekutif.

Apalagi, sekarang sudah ada putusan MK terbaru, perlukah ranperda ini dibahas lagi,” ungkap Nadi Putra saat ditemui, Kamis (6/8)

kemarin.

Guna menyikapi permasalahan tersebut, Pansus Retribusi Tower DPRD Badung menggelar rapat intern. Dari rapat intern tersebut, muncul berbagai pertanyaan terhadap pengajuan revisi tersebut oleh pihak eksekutif. “Kami mempertanyakan, apa dasar pengajuan ranperda ini dan hanya satu pasal saja yang mesti diganti yakni Pasal 8,” sebutnya.

Guna membahas usulan ini, pihak pansus akan mengundang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Badung untuk rapat kerja dengan elegendatif. “Kami akan panggil mereka untuk menjelaskan semuanya,” tegasnya.

Di tempat terpisah, Kepala

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Badung, Wayan Weda Darmaja yang dimintai konfirmasi, Kamis kemarin membenarkan telah mengajukan ranperda tersebut. Namun, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan pencabutan pembahasan ranperda itu.

Dijelaskannya, dari informasi yang terbaru, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sekaligus menghapus penjelasan Pasal 124 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) terkait tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi maksimal dua persen dari nilai jual objek pajak (NJOP). (kmb27)

Edisi : Jumat, 7 Agustus 2015

Hal : _____



Pemkab Gianyar Desak Dikeluarkan Juknis

Gianyar (Bali Post) –

Aliran dana yang dikelola desa semakin besar sehingga menimbulkan keraguan dan kekhawatiran terjadinya penyimpangan dalam pengelolaannya. Kekhawatiran itu juga dirasakan di Kabupaten Gianyar. Maka dari itu, baik Pemkab Gianyar maupun Forum Perbekel/Lurah menilai, pedoman atau petunjuk teknis yang jelas dalam mengelola dana desa merupakan kebutuhan yang sangat mendesak saat ini.

“Mengingat begitu besarnya dana yang dikucurkan pemerintah pusat ke desa, diperlukan adanya pemahaman dan pedoman teknis yang jelas. Upaya ini mendesak untuk dilakukan sehingga kepala desa bersama perangkat pelaksana lainnya tidak lagi takut ataupun ragu merealisasikannya khususnya kekhawatiran mereka terjerat kasus hukum,” ujar Asisten I Setda Gianyar Cokorda Rai Widiarsa Pemapayun, di Balai Budaya Gianyar, Kamis (6/8) kemarin.

Menurutnya, perangkat desa masih menemui kendala terutama masalah pengalokasian dana. Pengalokasian dana harus segera dipertegas melalui pedoman teknis yang jelas. Apalagi sampai sekarang belum semua kepala desa memahami masalah ini.

Tersedianya aturan yang jelas akan menghilangkan keraguan dan penyelewengan penggunaan anggaran yang dilakukan kepala desa. Dengan begitu, pelaksanaan pembangunan di desa bisa dilaksanakan secara cepat sesuai dengan aturan dan terhindar dari permasalahan hukum. Pedoman teknis yang jelas juga bakal menjadi motivasi bagi aparatur desa dalam merencanakan, mengelola dan mengawasi penggunaan dana desa.

Cok Rai Widiarsa memaparkan, dana desa yang bersumber dari APBN untuk Kabupaten Gianyar pada tahun anggaran 2015 mencapai Rp 19,166 miliar untuk digelontorkan kepada 64 desa. Pendistribusinya diatur melalui Perbup No. 43 tahun 2015 ten-

gung Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gianyar. Pada awal Mei 2015, dana yang sudah digelontorkan ke masing-masing rekening desa di Gianyar sebesar Rp 7,666 miliar. Total dana seterusnya akan digelontor dalam tiga tahap. Tahap I sebesar 40 persen, tahap II sebesar 40 persen, dan terakhir 20 persen.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Forum Perbekel/Lurah Kabupaten Gianyar I Gusti Ngurah Gede Susila. Pihaknya merasa yakin dana desa bisa diserap dan dioptimalkan penggunaannya. Hanya, pihaknya berharap ada regulasi dan aturan yang jelas dalam pengelolaannya. “Kami hanya perlu aturan dan petunjuk teknis yang jelas dalam pengelolaan dana tersebut. Sedangkan untuk masalah kekurangan SDM di tingkat desa, bisa dioptimalkan dengan melaksanakan berbagai pelatihan dan bimtek sesuai aturan yang ada,” katanya. (kmb25)

Edisi : Jumat, 7 Agustus 2015

Hal : 9



Pj. Bupati Arda Cek Rongsokan Obat

Amlapura (Bali Post) -

Penjabat Bupati Karangasem, Ida Bagus Ngurah Arda, Kamis (6/8) kemarin, mengecek bau menyengat rongsokan bekas obat-obatan pascaterbakar di tempat penimbunannya di Terminal Karangsokong, Karangasem. Arda mengatakan, rongsokan bekas obat itu perlu segera dipindahkan sehingga tak mengganggu lingkungan.

Rongsokan bekas obat-obatan itu selama ini dikeluarkan para pedagang Pasar Karangsokong karena baunya yang menyengat. Diduga bau menyengat di antaranya dari

alkohol yang banyak di rongsokan itu.

Kabag Humas dan Protokol Setdakab Karangasem Made Suparta mengatakan, terkait perintah Pj. Bupati untuk menanyakan lagi izin memindahkan obat rongsokan itu, sudah ditindaklanjuti. Soalnya, saat mengecek rongsokan obat itu, Pj. Bupati didampingi Kadishub Damkar I Wayan Sutapa, Kadikes dr. IGM Tirtayana, serta Kadis Kebersihan dan Pertamanan Made Suama.

Di lain pihak, Kadiskes Karangasem dr. IGM Tirtayana mengatakan, setelah pihaknya menanyakan soal

permohonan izin melalui surat per 4 Agustus untuk memindahkan rongsokan obat itu, Kapolres menyampaikan Jumat (7/8) ini, gundukan rongsokan obat itu bakal diratakan. Berikutnya, langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir sampai di Linggasana.

Suparta asal Sukawati, Gianyar itu mengatakan, yang dikhawatirkan Pj. Bupati, kalau sampai lama rongsokan itu dibiarkan ditimbun di terminal itu, selain dikeluhkan pedagang karena mengganggu lingkungan, juga dalam waktu dekat ini Pemkab Karangasem bakal dinilai tim lomba waha-

na tata nugraha (WTN). Tim penilai biasanya menanyakan warga di sekitar terminal, apakah mereka nyaman atau bagaimana? "Kalau rongsokan

obat itu lama di terminal itu, kami khawatirkan lingkungan warga di sekitarnya terganggu dengan bau menyengat," kata Suparta.

Diberitakan sebelumnya, rongsokan obat itu dipindahkan dari gudang farmasi Diskes Karangasem yang dua kali berturut-turut terbakar. Keba-

karan pertama terjadi Jumat (31/7) sore, menghancurkan seluruh obat dan gudang farmasi. Kerugian ditaksir sekitar Rp 3,5 miliar. (013)



Proyek Drainase Rekanan Terancam Di-''blacklist''

Negara (Bali Post) -

Rekanan pelaksana pengerjaan drainase dan trotoar di Melaya terancam di-*blacklist*. Kendati masa kontrak pengerjaan sudah selesai sebulan lebih, namun rekanan diberikan waktu pengerjaan hingga 50 hari. Kamis (6/8) kemarin merupakan batas akhir pengerjaan. Dan bila hari ini belum rampung, maka rekanan asal Jawa Timur itu akan di-*blacklist* dan sisa pengerjaan akan dirampungkan rekanan lain.

Ketua Komisi C DPRD Jembrana Ida Bagus Susrama ditemui kemarin mengatakan, komisi telah menerima laporan terkait pengerjaan drainase yang terlambat tersebut. "Kita sempat panggil PU, apa yang akan dilakukan. Dan rekanan diberikan tambahan waktu hingga 50 hari, tetapi pinalti tetap jalan," terangnya. Dewan asal Pendem ini menilai penambahan waktu tersebut merupakan kebijakan dinas yang menaungi, namun apabila hingga batas waktu tidak rampung, harus di-*blacklist*.

Konsekuensinya, rekanan yang mengerjakan tidak boleh lagi mengerjakan proyek tersebut. Jaminan diambil untuk negara dan dibayar sesuai hasil yang dikerjakan. "Kalau ada

yang kurang, misalnya hanya 90 persen, ya dibayar sebesar pengerjaan itu saja," tandasnya didampingi anggota Komisi C Nyoman Renteb. Dewan mengaku akan turun mengecek apabila hal tersebut memang belum rampung.

Sementara itu, dari informasi hingga kemarin pengerjaan masih berlangsung. Sejatinya, sesuai kontrak, CV Istana Mas dari Probolinggo ini diberikan waktu hingga 17 Juni lalu. Namun, Pemkab Jembrana memberikan perpanjangan waktu 50 hari agar proyek tersebut bisa rampung. Selama perpanjangan waktu ini, rekanan tetap dikenai denda 1/1.000 dari nilai kontrak per harinya.

Pengerjaan dengan kontrak nomor 14 PPK-drainase/SDA/III/2015 itu senilai Rp 565.703.000. Rekanan ini juga diketahui mengerjakan jenis pekerjaan yang sama di Desa Pekutatan. Namun nilainya lebih kecil, yakni Rp 312.388.000. Saat itu, pengerjaan drainase menuju TPI Pekutatan itu sempat belum dikerjakan hingga hampir sebulan, kendati waktu pengerjaan sudah dimulai. Pengerjaannya pun hampir bersamaan dengan proyek serupa di Melaya. Tetapi untungnya, pengerjaan di Pekutatan itu sudah rampung. (kmb26)

Edisi : Jumat, 7 Agustus 2015

Hal : 10



Puluhan Juta Bantuan Dikucurkan

Subak Pacung Tak Pernah Kebagian

Gianyar (Bali Post) -

Puluhan juta rupiah kini disalurkan pemerintah Provinsi Bali untuk kesejahteraan subak di sembilan kabupaten. Namun, bantuan tersebut ternyata tidak meng-cover semua subak di Kabupaten Gianyar. Salah satu subak yang tidak merasakan manisnya bantuan tersebut adalah Subak Pacung, di Banjar Uma Dawa Desa Pejeng Kangin, Tampaksiring.

Hal ini diungkapkan Peka-seh Subak Pacung, Desa Pejeng Kangin, I Wayan Taman. Dikatakannya, setiap tahun semua subak di Desa Pejeng Kangin memperoleh bantuan rutin dari Pemkab Gianyar dan Pemprov

Bali. "Kalau subak yang lain di Desa Pejeng Kangin dulu dapat bantuan Rp 20 juta per tahun dari Dinas Provinsi, kalau sekarang katanya bantuan sampai Rp 50 juta. Sementara kami di Subak Pacung dari dulu sampai sekarang, sepeser pun tidak pernah memperoleh bantuan dari pemerintah, baik pemkab atau pemprov," keluhnya Kamis (6/8) kemarin.

Dikatakannya, kondisi ini sempat dipertanyakan di Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar. Hasilnya, dari ratusan subak yang ada di Gianyar ternyata subak Pacung tidak tercatat di Disbud. "Saya sendiri sudah ke

Disbud menanyakan hal ini, tapi dari data yang ditunjukkan ternyata nama subak kami tidak ada, sehingga mereka (Dinas Kebudayaan, red) tidak pernah memberikan bantuan," ungkapnya seraya mengatakan, subaknya hanya rutin menerima bantuan pupuk dari PPL Pejeng Kangin. "Inilah yang sampai sekarang kami tidak mengerti. Kalau bantuan pupuk dari PPL Pejeng Kangin nama subak kami ada, sehingga rutin mendapat bantuan seperti pupuk poska, organic, dan urea. Sementara bantuan tunai dari pemprov atau pemkab sama sekali tidak ada," katanya.

Sementara Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar, I Gusti Ngurah Wijana, mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan kembali terhadap subak tersebut. "Bantuan ini didasarkan pada kepemilikan SK Gubernur tentang verifikasi subak, berdasarkan pendataan subak. Kalau tidak ter-cover berarti nama subak tersebut memang tidak ada dalam SK. Sehingga kalau tidak tercatat ya, tidak bisa mendapat bantuan. Kalau ini mendapat bantuan kan bisa jadi temuan nanti. Tapi terkait Subak Pacung ini akan kami cek dulu," ucap Wijana. (kmb35)

Edisi : _____

Hal : _____



Rapat Paripurna

DPRD Setujui Dua Ranperda

SETELAH melewati proses yang alot, DPRD Karangasem akhirnya menyetujui dua ranperda dari tiga ranperda, untuk disahkan menjadi perda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Karangasem, Kamis (6/8) kemarin. Dua ranperda itu, antara lain Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Karangasem. Sedangkan satu Ranperda lagi, tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas (PT) Karangasem Sejahtera, ditolak empat fraksi dari enam fraksi di DPRD Karangasem.

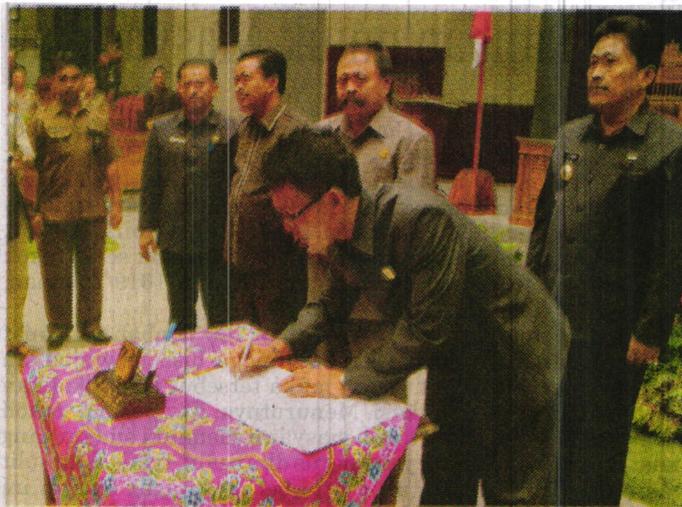
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi, dihadiri Penjabat Bupati Karangasem Ida Bagus Ngurah Arda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Karangasem, pimpinan dan anggota DPRD Karangasem dan jajaran

SKPD Karangasem. Dalam laporan gabungan komisi DPRD yang dibacakan I Nyoman Mardana Wimbawa, mengatakan ketiga ranperda tersebut sebelumnya telah disampaikan Bupati Karangasem pada rapat paripurna DPRD, 23 Juni lalu. Kemudian telah mendapat pembahasan oleh gabungan komisi DPRD Karangasem dengan Pemkab Karangasem.

Mardana menyampaikan kembali latar belakang penyampaian ketiga ranperda tersebut, kemudian pendapat akhir masing-masing fraksi. Kedua ranperda di atas disetujui menjadi perda dengan beberapa catatan oleh setiap fraksi. Fraksi Golkar, memberikan catatan agar penerimaan APBD ke masing-masing kecamatan dilakukan pemerataan. Aset aset sekolah yang masih bermasalah agar segera diselesaikan. Sementara untuk PDAM, Fraksi Golkar

menyarankan agar PDAM menambah sambungan air bersih ke pedesaan, sehingga kebutuhan masyarakat miskin terhadap air bersih dapat terlayani.

Demikian juga pendapat akhir fraksi dari Fraksi PDI-P, Demokrat, Gerindra, NasDem, dan Fraksi Bhineka. Fraksi Demokrat memberikan catatan, piutang retribusi yang terjadi selama tahun 2013, agar tidak terulang lagi tahun depan. "Dinas terkait yang membidangi, agar membuat langkah-langkah antisipasi," kata Mardana. Sementara, Fraksi Gerindra menekankan agar segala temuan dalam audit BPK dalam pelaksanaan anggaran tahun 2014, yang menghasilkan opini Wajar dengan Pengecualian, segera ditindaklanjuti. Sehingga, menjadi dasar pertimbangan dalam pelaksanaan APBD tahun-tahun berikutnya, untuk mendapatkan opini Wajar



TANDA TANGANI DOKUMEN - Ketua DPRD Karangasem Nengah Sumardi menandatangani dokumen pengesahan dua ranperda menjadi perda bersama Penjabat Bupati Karangasem.

Tanpa Pengecualian (WTP).

Dengan menyimak pendapat akhir fraksi itu, akhirnya diputuskan mengesahkan dua ranperda. Sementara, satu ranperda lagi diminta tidak diajukan lagi karena sudah tidak disetujui. Di pihak lain, Penjabat Bupati Karangasem Ida Bagus Ngurah Arda, menyampaikan penghargaan terhadap lembaga DPRD

Karangasem, yang sudah bekerja keras melakukan pembahasan terhadap ketiga ranperda yang telah diajukan eksekutif. Namun, ia berharap agar ranperda tentang penyertaan modal daerah kepada perseroan terbatas (PT) Karangasem Sejahtera, ke depan dapat dilanjutkan pembahasannya di lembaga dewan. (ad492)



Seragam Baru PNS Damkar Rp 264 Juta

Mangupura (Bali Post) –

Pengadaan pakaian Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Badung menelan dana yang tidak sedikit. Nilai pagu proyek seperti terpampang di unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), tercatat Rp 264 juta lebih dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 252 juta lebih.

Kepala Dinas Damkar Badung I Gst. Nyoman Adnyana saat dimintai konfirmasi, membenarkan perihal pengadaan seragam dinas tersebut. Dia menyebutkan, pembagian pakaian dinas hanya untuk para PNS saja, sedangkan untuk pegawai dengan status kontrak akan diupayakan secara bertahap tahun depan. "Tahun

ini untuk kalangan PNS dulu, kurang lebih 150 pegawai. Untuk yang kontrak, akan kami upayakan bertahap," ungkap Nyoman Adnyana, Kamis (6/8) kemarin.

Menurutnya, pengadaan ini berdasarkan kebutuhan pegawai, dan berharap pengadaan berikutnya bisa mencakup karyawan kontrak. "Mudah-mudahan tahun depan secara bertahap bisa dilakukan pengadaan (pakaian dinas, red) untuk pegawai kontrak," ucapnya.

Selain pengadaan seragam, mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Badung ini juga berencana membangun UPT Baru untuk pos pemadam kebakaran. Berdasarkan skenario

dari pemetaan wilayah Badung Utara dan Badung Selatan, akan dibangun dua lagi pos pemadam tahun 2016 mendatang. "Mudah-mudahan tidak ada halangan, tahun depan bisa terealisasi. Dari petunjuk pimpinan, dua pos yang nanti akan dibangun, satu di kawasan Abiansemal dan satu lagi di kawasan Kuta," jelasnya.

Dengan tambahan pos pemadam tersebut, diharapkan kerja seluruh personel dalam menjalankan tugasnya sebagai penjinak apabila terjadi musibah kebakaran, dapat lebih maksimal. "Sementara sudah ideal. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan perlu tambahan personel lagi bila pos pemadam baru selesai dibangun," pungkasnya. (kmb27)